

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Studi ini dimaksudkan guna menguji dan menganalisis dampak pengetahuan perpajakan, omzet, serta kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Data dihimpun melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 100 responden yang ialah pelaku UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat. Temuan studi ini memberikan deskripsi tentang bagaimana pengetahuan perpajakan, omzet, serta kepercayaan kepada pemerintah berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya, terutama dalam aspek pelaporan pajak. Mengacu pada hasil pengujian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dari studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Kondisi ini dapat dilihat melalui tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang menandakan kalau semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

cenderung bertambah. Pelaku UMKM yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya akan lebih sadar dan yakin dalam menyampaikan laporan serta melunasi pajaknya secara benar.

2. Omzet tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Kondisi ini dapat dilihat melalui tingkat signifikansi 0,575 yang lebih besar dari 0,05, yang menandakan kalau tinggi rendahnya penghasilan yang didapat pelaku UMKM tidak bisa menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Situasi ini bisa dipicu oleh tingginya kesadaran wajib pajak pelaku UMKM guna patuh walaupun omzet yang diperoleh tidak besar.
3. Kepercayaan kepada pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Kondisi ini dapat dilihat melalui tingkat signifikansi 0,612 yang lebih besar dari 0,05, yang menandakan kalau tingkat kepercayaan pelaku UMKM kepada pemerintah tidak bisa menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kondisi ini bisa dipicu oleh walaupun tingkat kepercayaan rendah, wajib pajak tetap memperlihatkan kepatuhan yang tinggi karena ada rasa khawatir terhadap sanksi administratif atau denda yang diterapkan bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

5.2 Keterbatasan

Studi ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan guna memberikan wawasan yang lebih objektif mengenai hasil pengujian dan sebagai pertimbangan guna studi-studi berikutnya. Keterbatasan yang dihadapi dalam proses studi ini ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan banyaknya variabel. Studi ini hanya menganalisis tiga variabel, yakni pengetahuan perpajakan, omzet, serta kepercayaan kepada pemerintah. Mengacu pada hasil uji determinasi, ketiga variabel ini hanya 18,6% yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 81,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
2. Hambatan dalam pengumpulan data primer. Beberapa responden memperlihatkan keraguan dalam melengkapi kuesioner karena ada stigma kalau pajak ialah topik yang sensitif. Kondisi ini membuat peneliti tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tingkat keseriusan dan kejujuran responden dalam melengkapi kuesioner, sehingga memungkinkan ada jawaban yang tidak merefleksikan situasi yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Mengacu pada temuan studi yang telah dilaksanakan tentang dampak pengetahuan perpajakan, omzet, serta kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat, serta mempertimbangkan keterbatasan studi ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat pajak diharapkan bisa lebih transparan dalam menyajikan data mengenai realisasi pajak UMKM secara berkala. Pemerintah perlu terus mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi perpajakan karena temuan studi memperlihatkan kalau pengetahuan perpajakan memberikan dampak terhadap kepatuhan. Pemerintah juga perlu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak mengingat hasil pengujian kalau kepercayaan kepada pemerintah belum memberikan dampak yang berarti.
2. Peneliti berikutnya disarankan guna mempertimbangkan metode pengumpulan data lain selain kuesioner, seperti wawancara atau observasi guna mendapatkan data yang lebih tepat. Penambahan ukuran dan pemilihan variabel yang lebih beragam juga disarankan agar bisa meningkatkan nilai koefisien determinasi. Variabel seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, serta kualitas pelayanan pajak bisa dijadikan alternatif yang dapat membantu meningkatkan nilai koefisien determinasi.